

# Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja

## Implementation of Violation Point System in Improving Student Discipline in Senior High School 5 Tana Toraja

Aditya Kristian<sup>1\*</sup>, Andi Nurochmah<sup>2</sup>, Andi Wahed<sup>3</sup>

Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

\*Penulis Koresponden: [adityakristian93@gmail.com](mailto:adityakristian93@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penerapan sistem poin dan dampaknya terhadap tingkat kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang diterapkannya sistem poin yaitu untuk menegakkan disiplin siswa dan mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. Pihak pelaksana dalam sistem poin adalah semua komponen sekolah yang sudah memiliki peran dan tugas masing-masing. Dalam tata aturan sistem poin setiap pelanggaran mempunyai bobot poin masing-masing, penghargaan (reward) berupa penghapusan poin diberikan kepada siswa yang berprestasi dan siswa yang akumulasi poin pelanggarannya sudah cukup 100 akan dikeluarkan dari sekolah. Prosedur penanganan terhadap siswa yang akumulasi poinnya tinggi dilakukan sebanyak tiga kali, pembinaan pertama 30 poin, pembinaan kedua 50, dan pembinaan ketiga 75 poin, pembinaan siswa melibatkan wali kelas, wakasek bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling dan orang tua siswa. Faktor penghambat pelaksanaan sistem poin yaitu sebagian guru tidak menjalankan sistem poin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah dalam mengawasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Penerapan sistem poin di sekolah sudah cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, dimana sebagian besar siswa sudah menaati aturan tata tertib yang berlaku di sekolah.

**Kata Kunci:** Sistem Poin Pelanggaran, Kedisiplinan

### Abstract

This study aims to see the description of Principals managerial capability and improving the quality of education as well the effect of the principal's managerial capabilities on improving the quality of education at the state junior high school in the sub district watang sawitto of district pinrang. The problem in this study is: (1) how the description of Principal's managerial capability at the state junior high school in the sub district watang sawitto of district pinrang, (2) how the description of improving the quality of education at the state junior high school in the sub district watang sawitto of district pinrang, (3) is there a significant effect between the managerial ability of the principal on improving the quality of education at the state junior high school in the sub district watang sawitto of district pinrang. This type of research uses a ex post facto method with a sample of 66 teacher's determined by random sampling technique. The instrument use in the form of a questionnaire with respondents as a teacher. The analysis used descriptive analysis and inferential analysis. The result of the study using descriptive analysis showed the following results: (1) The managerial ability of the headmaster of State Junior High School in Watang Sawitto District of Pinrang Regency in the very high category is 89.4%, (2) Improving the quality of state junior high school education in Watang Sawitto District of Pinrang Regency in the very high category of 81.8%, and the results of research using inferential analysis show, (3) There is a significant influence between the managerial ability of the principal with the improvement of the quality of education.

**Keywords:** Managerial Ability, Improving the Quality of Education

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakekatnya adalah sebagai usaha menyiapkan anak didik untuk menghadapi lingkungan hidup yang senantiasa mengalami perubahan dan pendidikan itu pada dasarnya

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi serta masyarakat. Dalam hal ini sekolah merupakan lingkungan dimana siswa dapat mengikuti serangkaian kegiatan yang bersifat mendidik, sehingga sekolah memiliki peran yang sangat besar

dalam mendidik siswa-siswinya agar memiliki jiwa disiplin dalam dirinya. Pendidikan sekolah diselenggarakan untuk memberi bekal dasar untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab. Hal ini dapat dipahami dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 Amandemen kedua yang berbunyi bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur undang-undang".

Dari landasan diatas maka dari tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menjelaskan bahawa tujuan pendidikan Nasional adalah: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemajuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis serta bertanggung jawab.

Pengendalian sikap dan perilaku siswa sebagai pelajar di sekolah sangat dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam kehidupan. Lemahnya pengendalian diri pada individu/siswa akan berdampak pada terbentuknya perilaku menyimpang, yang disebut sebagai masalah disiplin yang menggejala dalam bentuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, seperti: perilaku membolos, terlambat masuk sekolah, ribut di kelas, ngobrol di kelas saat guru sedang menjelaskan mata pelajaran, tidak mengenakan atribut sekolah secara lengkap, menyontek (Widodo, 2009). Perilaku siswa yang demikian menunjukkan siswa yang kurang disiplin dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar yang terdidik.

Sistem poin merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam tata tertib yang diambil sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin pelanggaran adalah pemberian sanksi atau hukuman atas setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa dengan memberikan sejumlah poin tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa (Firdaus, 2015). Sistem poin ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan

oleh para siswa diberikan sanksi yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan sistem poin mempunyai kelebihan diantaranya menghindari adanya sanksi atau hukuman dengan fisik yang marak terjadi di sekolah-sekolah (Wijayanti, 2013). Hukuman fisik tidak selamanya efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan, hukuman yang dimaksudkan untuk membuat anak menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya tidak jarang menurunkan kepercayaan diri anak dan menimbulkan dendam yang mendalam.

Titik berat penerapan sistem poin pelanggaran bertujuan untuk mengurangi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa dan menegakkan disiplin sekolah. Sistem poin mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan kartu kuning (peringatan) yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Setiap poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa dikumpulkan sampai batas waktu tertentu. Jika poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa telah mencapai batas maksimal, maka kartu kuning tadi dapat berubah menjadi kartu merah sebagai isyarat bahwa siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah (diberhentikan).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran penerapan sistem poin pelanggaran. Rasa keingintahuan peneliti ini kemudian dituangkan melalui penelitian ilmiah yang berjudul "Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja"

## **2. TINJAUAN PUSTAKA (jika diperlukan)**

### **2.1 Pengertian Sistem Poin Pelanggaran**

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian tujuan utama. Selanjutnya Ahmadi (2017) mengemukakan bahwa sistem adalah sebuah tatanan yang menjelaskan adanya rangkaian komponen yang saling berhubungan, dan memiliki tujuan yang sama secara seimbang dan terkoordinasi serta serasi dalam waktu yang sudah terencana.

Sistem poin pelanggaran adalah pemberian sanksi atau hukuman atas setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa dengan memberikan sejumlah poin tertentu untuk setiap jenis pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa

(Firdaus, 2015). Sistem poin merupakan salah satu kebijakan yang diambil sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah, masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecil dan besarnya pelanggaran (Susanto et al., 2013). Sistem poin merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin siswa, sistem ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan sanksi yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan siswa (Fitriwati et al., 2015). Penerapan sistem poin juga mempunyai kelebihan, diantaranya menghindari adanya hukuman dengan kekerasan fisik yang marak terjadi di sekolah-sekolah (Wijayanti, 2013). Dengan penerapan sistem poin juga diharapkan akan membuat para siswa jera dalam melakukan pelanggaran kembali terhadap tata tertib sekolah tanpa harus melakukan hukuman fisik atau hukuman yang lainnya.

Masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda sesuai dengan tingkatan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Jadi, semakin sering siswa melakukan pelanggaran maka poinnya akan semakin bertambah juga. Pihak sekolah akan memberikan peringatan kepada siswa yang bersangkutan ketika poinnya telah mencapai batas-batas tertentu. Adanya peringatan tersebut siswa merasa telah mendapat hukuman atas kesalahan (pelanggaran) yang telah diperbuatnya (Amnan, 2017). Diterapkannya sistem poin ini diharapkan para siswa dapat mempertimbangkan kembali ketika ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain.

Menurut Schaefer (1996) mengemukakan ada dua puluh pedoman dalam menjatuhkan hukuman kepada siswa yang melanggar disiplin sekolah. Dari dua puluh pedoman tersebut, terdapat enam pedoman yang mengilhami pemberlakuan sistem poin seperti berikut ini: 1) hukuman itu harus jelas dan terang, 2) hukuman harus konsisten, 3) hukuman diberikan dalam waktu secepatnya, 4) bentuk-bentuk hukuman yang diberikan sebaiknya melibatkan siswa, 5) pemberian hukuman harus objektif, 6) hukuman sebaiknya tidak bersifat fisik.

## 2.2 Pelaksanaan Sistem Poin Pelanggaran

### a. Tata aturan dalam sistem poin

Dalam pelaksanaan sistem poin, mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan kartu kuning

(peringatan) yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Setiap poin pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa dikumpulkan sampai batas tertentu selama satu semester, jika poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa telah mencapai batas maksimal, maka kartu kuning tadi (peringatan) dapat dapat berubah menjadi kartu merah sebagai isyarat bahwa siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah (Hidayati, 2013).

Pelaksanaan sistem poin pelanggaran di lingkungan sekolah sebenarnya sangat sederhana. Setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib diberikan skor poin pelanggaran oleh guru dengan menulis nama, kelas, jenis pelanggaran dan jumlah poin pada kertas poin, kemudian kertas poin tersebut diserahkan ke bagian kesiswaan untuk di rekapitulasi ke dalam buku poin pelanggaran siswa (Taqiyya, 2013). Setelah poin direkapitulasi, siswa yang mempunyai poin pelanggaran tinggi akan dilakukan pemanggilan ke ruang bimbingan konseling untuk diberikan arahan dan dilakukan pemanggilan orang tua/wali bila diperlukan. Dengan begitu akan terjalin kerjasama antar orang tua siswa dengan pihak sekolah (Tjalla & Tain, 2004).

### b. Pihak pelaksana atau personel sistem poin

Personel dalam sistem poin adalah tim yang akan merencanakan dan melaksanakan rangkaian kegiatan dalam upaya menegakkan disiplin di sekolah dengan menggunakan bobot penilaian. Menurut Susanto (2015) personel sistem poin mempunyai kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan sistem poin dan mempunyai garis koordinasi satu dengan yang lain sehingga dalam penerapannya kepada siswa akan terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar komponen pelaksana. Melalui kerjasama dan komunikasi yang baik maka hasil yang akan dicapai dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pembagian tugas atau wewenang dalam sistem poin merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh aspek sekolah ini dilakukan karena bertujuan untuk mewujudkan struktur organisasi agar wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih jelas. Menurut Handoko (2011) bahwa pembagian kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya. Pembagian kerja merupakan rincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi.

### 2.3 Tujuan Penerapan Sistem Poin

Tujuan penerapan sistem poin pelanggaran bagi guru yaitu sebagai pedoman bagi guru serta pelaksana pendidikan dalam rangka menentukan nilai kepribadian siswa yang mencakup kelakuan, kerajinan, kerapian dan lebih memudahkan guru untuk mengontrol setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap siswa. Dengan mempunyai kepribadian yang tangguh maka diharapkan siswa untuk selalu bersikap yang baik sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia (Ariananda et al., 2016). Sedangkan tujuan penerapan sistem poin bagi siswa adalah untuk memudahkan pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan siswa serta membuat siswa menjadi lebih disiplin dan tekun dalam aktivitas pembelajaran dan juga agar siswa selalu terbiasa untuk taat terhadap tata tertib dalam setiap aktivitas di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat (Susanto, 2015).

Menurut Hidayati (2013) tujuan penggunaan sistem poin yaitu dalam rangka membantu pelaksanaan penilaian non akademis (pendidikan karakter) yang hasilnya harus di pertanggung jawabkan kepada orang tua ataupun sekolah, baik melalui buku pencatatan poin ataupun dalam rapor. Selain itu agar siswa lebih memahami tata tertib sekolah, sehingga siswa dapat menerapkan peraturan tersebut secara baik, dengan demikian pelanggaran dapat di minimalisir dengan baik sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. Keberadaan sistem poin dalam tata tertib memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah agar lebih disiplin.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti berusaha mengungkap fenomena yang terjadi secara melalui pengumpulan data secara alami untuk mencari makna dari fenomena yang terjadi di lapangan. "Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic dan rumit" (Moleong, 2018). dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan dsb secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah.

### 3.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Moleong; 2018). Kehadiran peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan penelitian sangat berperan penting di lokasi penelitian terutama dalam melakukan observasi langsung. Selain itu instrumen lainnya yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman, yaitu pedoman dalam melakukan wawancara, pedoman melakukan observasi dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti melakukan tugasnya di lapangan dan sebagai pengendali agar informasi yang diperoleh sesuai dengan perencanaan peneliti.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini, tahap analisis data kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman:

- a. Tahap Pengumpulan Data (Collecting)
- b. Tahap Reduksi Data
- c. Tahap Penyajian Data (Display Data)
- d. Tahap Penarikan kesimpulan dan verifikasi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### a. Latar belakang penerapan sistem poin

Pada tahun ajaran 2008/2009 sekolah membuat kebijakan baru yaitu menerapkan sistem poin dalam tata tertib sekolah. Dimana setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib akan dikenakan poin sesuai aturan yang telah ada. Sistem poin merupakan sebuah kebijakan yang diambil guna mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah.

Latar belakang penerapan sistem poin pelanggaran di SMAN 5 Tana Toraja yaitu dikarenakan maraknya kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa sehingga pihak sekolah mencari upaya untuk mendisiplinkan siswa dan menegakkan tata tertib sekolah serta mempermudah penanganan terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Sistem poin dipilih dikarenakan pelaksanaannya yang mudah dipahami oleh pihak sekolah maupun siswa dan orang tua siswa.

### b. Pihak pelaksana sistem poin

Pelaksanaan sistem poin pelanggaran di sekolah tentunya memerlukan kerjasama antar semua personil sekolah. Melalui Kerjasama dan komunikasi yang baik hasil yang akan dicapai dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan sistem poin di sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Bukan hanya guru yang berhak memberikan poin pelanggaran tetapi pegawai juga mempunyai wewenang untuk memberikan poin kepada siswa yang kedapatan melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan tugas setiap personil sekolah dalam sistem poin juga sudah tertata dengan baik.

### c. Tata aturan sistem poin

Setiap jenis pelanggaran memiliki bobot poin yang berbeda, tergantung dari tata tertib apa yang dilanggar, bobot poin terendah adalah 3 poin jenis pelanggarannya misalnya tidak memakai atribut sekolah yang lengkap dan jenis poin pelanggaran dengan bobot poin tertinggi yaitu 100 jenis pelanggarannya misalnya menggunakan obat-obatan terlarang dan memukul guru, pada poin 100 artinya siswa langsung diberhentikan dari sekolah. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Dalam tata aturan sistem poin pelanggaran setiap jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa akan dikenakan poin, bobot poin yang diberikan tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan, penghargaan (reward) berupa penghapusan poin pelanggaran diberikan kepada siswa berprestasi, setiap kenaikan kelas atau tahun ajaran baru poin siswa kembali menjadi nol (0) atau dihapuskan, dan siswa dengan akumulasi poin 100 akan diberhentikan dari sekolah.

### d. Prosedur penanganan sistem poin

Prosedur penanganan pelanggaran siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja sudah terlaksana dengan baik dimana pembinaan terhadap siswa dengan akumulasi poin tinggi dilakukan sebanyak tiga kali sekaligus dilakukan pemanggilan orang tua yang mana pembinaan pertama 35 poin, pembinaan kedua 50 poin, dan pembinaan ketiga 75 poin, hal ini agar orang tua bisa mengetahui perkembangan kedisiplinan anaknya. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa di luar lokasi sekolah akan tetap mendapat pembinaan dari sekolah baik itu didapat langsung oleh guru ataupun laporan dari masyarakat atau temannya.

### e. Faktor Penghambat dan faktor pendukung

Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem poin yaitu terkadang ada saja guru yang malas memberikan

poin, orang tua siswa yang kurang cepat merespon surat pemanggilan, dan masih ada sebagian siswa yang sulit untuk dibina. Selanjutnya kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus menangani tata tertib siswa menjadi salah satu kendala dalam menjalankan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja adalah adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah dan terutama dengan orang tua siswa dan kesadaran dari siswa untuk menaati peraturan yang ada.

### f. Dampak penerapan sistem poin

Penerapan sistem poin pelanggaran dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kedisiplinan siswa, terdapat perbedaan tingkat kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah penerapan sistem poin dimana setelah diterapkan, pelanggaran tata tertib sudah jarang dilakukan oleh siswa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem poin pelanggaran cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, dikatakan cukup karena masih ada sebagian kecil siswa yang sering melanggar tata tertib sekolah.

## 4.2. Pembahasan

### a. Latar belakang penerapan

Penerapan sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja, pada dasarnya sudah menagacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Permendiknas RI No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan dasar dan menengah, termasuk seluruh aturan yang di persyaratkan di dalamnya, yaitu adanya petunjuk, peringatan dan larangan dalam berperilaku, serta adanya pemberian sanksi bagi yang melanggar tata tertib.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang diterapkannya sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja dimaksudkan untuk menekan pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Maka secara tidak langsung sistem poin yang diterapkan sekolah akan membawa siswa kedalam kondisi yang baik dan teratur dalam proses belajar mengajar, karena berisikan larangan yang harus ditaati oleh siswa, dan berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku siswa.

### b. Pihak pelaksana sistem poin

Pihak pelaksana dalam sistem poin merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian yang baik,

ini dilakukan karena bertujuan untuk mewujudkan tugas tiap bidang, wewenang, dan tanggung jawab menjadi lebih jelas. Menurut Susanto (2015) personel sistem poin mempunyai kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan sistem poin dan mempunyai garis koordinasi satu dengan yang lain sehingga dalam penerapannya kepada siswa akan terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar komponen pelaksana.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja pada dasarnya sudah dilakukan pembagian tugas dan fungsinya pada masing-masing komponen pelaksana. Prosedur pelaksanaannya sendiri sudah dijalankan oleh pihak pelaksana dengan baik, akan tetapi tidak semua pihak menjalankan aturan sebagaimana mestinya.

#### c. Tata aturan sistem poin

Dalam pelaksanaan sistem poin setiap sekolah memiliki mekanisme masing-masing sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Ahmadi (2017) sebuah peraturan akan berjalan dengan lancar, tidak terlepas dari dua hal yaitu, 1) hukuman atau sanksi; 2) penghargaan atau reward, dua hal ini tentunya akan dapat dilakukan melalui sistem poin pelanggaran. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah, masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecil dan besarnya pelanggaran.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, tata aturan dalam sistem poin pelanggaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Tana Toraja sudah mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ahmadi (2017) dan Taqiyya (2013) dimana tata aturannya sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari jumlah poin tiap pelanggaran, sanksi atau hukuman dari jumlah poin yang di dapatkan, dan reward atau penghargaan yang diberikan kepada siswa berupa pengurangan jumlah poin.

#### d. Prosedur penanganan sistem poin

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sistem poin pelanggaran yang diterapkan di SMA Negeri 5 Tana Toraja berlaku baik di sekolah maupun di luar sekolah, selama siswa tersebut masih berstatus sebagai siswa SMA Negeri 5 Tana Toraja, maka pihak sekolah tetap melakukan pembinaan. Namun dalam penanganannya tidak serta merta siswa tersebut langsung diberikan poin, tetapi pihak sekolah perlu

mengkaji lebih jauh terhadap pelanggaran yang terjadi.

#### e. Faktor penghambat dan faktor pendukung

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem poin yaitu masih ada beberapa guru yang tidak memberikan poin ketika siswa melanggar tata tertib, orang tua siswa yang kurang cepat merespon surat panggilan, dan masih ada sebagian siswa yang sulit untuk dibina, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus menangani pengelolaan poin pelanggaran siswa menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja adalah adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah dan terutama dengan orang tua siswa dalam membina siswa yang sering melanggar tata tertib.

#### f. Dampak penerapan sistem poin

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem poin pelanggaran cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, dimana pelanggaran tata tertib siswa bisa di minimalisir dikarenakan adanya sanksi poin. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian kecil siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib, hal ini dikarenakan karakter dari siswa tersebut yang sulit untuk dibina.

Sebelum diterapkannya sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja pelanggaran tata tertib sangat marak dilakukan siswa. Setelah penerapan sistem poin tingkat kedisiplinan siswa sudah berangsur membaik, dimana sudah tidak ditemukannya siswa yang sering bolos dan merokok di lokasi sekolah, hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem poin di sekolah cukup efektif dan berdampak baik terhadap kedisiplinan siswa.

## 5. KESIMPULAN

- 1) Gambaran penerapan sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja, dimulai dari latar belakang pendidikan, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, tata aturan dalam pelaksanaannya, prosedur penanganan terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa, serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan dari gambaran penerapan dan pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik.

2) Dampak penerapan sistem poin dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem poin pelanggaran cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, dimana pelanggaran tata tertib siswa bisa di minimalisir dikarenakan adanya sanksi poin. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian kecil siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib, hal ini dikarenakan karakter dari siswa tersebut yang sulit untuk dibina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2017). *Asas dan Filsafat Pendidikan*. In Ar-Ruzz Media.
- Amnan, I. W. (2017). *Penerapan sistem poin terhadap tingkat kedisiplinan siswa di SMA Negeri 1 Makale*.
- Ariananda, E. S., Hasan, S., & Rakhman, M. (2016). *Pengaruh Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Teknik Pendingin*. *Journal of Mechanical Engineering Education*, 1(2), 233.
- Firdaus, M. R. (2015). *Efektifitas Penerapan Poin Pelanggaran Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Santri Pada Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan*.
- Fitriwati, C., Sulistyarini, & Parijo. (2015). *Penerapan Sistem Poin Dalam Menanggulangi Siswa Yang Melanggara Aturan di SMAN 2 Pontianak*.
- Handoko, H. (2011). *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Penerbit PBF.
- Hidayati, N. I. (2013). *Peningkatan Kerapain Dalam Berpakaian Siswa Dengan Menggunakan Kartu Disiplin*.
- Schaefer, C. (1996). *Cara Efektif Mendidik Dan Mendisiplinkan Anak* (T. Sirait (ed.)). Mitra Utama.
- Susanto, E. (2015). *Manajemen Sistem Poin Dalam Membina Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 4 Lubuklinggau*. *Journal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 370–376.
- Taqiyya, U. I. (2013). *Implementasi kebijakan penerapan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran siswa pada SMAN 1 Jekulo kudas*.
- Tjalla, A., & Tain, S. (2004). *10 kesalahan orang tua & guru dalam mendidik & solusinya*. An-Najah Press.
- Widodo, B. (2009). *Keefektivan Konseling Kelompok Realitas Untuk Meningkatkan Perilaku Disiplin Siswa di Sekolah*.
- Wijayanti, A. T. (2013). *manajemen Pelanggaran Tata Tertib Siswa di MAN 1 Pontianak*.